

## **IMPLEMENTASI MANAJEMEN WAKAF PADA LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN**

**Ali Mustofa, Tulus Suryanto, Ruslan Abdul Ghofur**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis: *alimustofabrisyariah@gmail.com*

### **Abstract**

This study explores the implementation of waqf management at the Muhammadiyah Regional Leadership (PWM) of Lampung as one of the socio-religious institutions in Lampung Province, Indonesia. In addition, this study also examines its contribution to improving people's welfare. Sampling in this study using purposive sampling method. Until 2020, there are 14 waqf areas managed by PWM Lampung, while this research takes the Bandar Lampung area as the research object. The results showed that the waqf management at PWM Lampung was carried out with the concept of optimizing waqf assets, namely by the collection, maintenance, and utilization of waqf assets, thus giving a positive impact on people's income. The increase in income has not been able to have a significant impact, because the increase in income has not met welfare standards.

**Keywords:** Manajement, Waqf, Welfare

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi pengelolaan wakaf pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung sebagai salah satu lembaga sosial keagamaan di Provinsi Lampung, Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga memeriksa kontribusinya dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampai pada tahun 2020, terdapat 14 wilayah wakaf yang dikelola oleh PWM Lampung, sedangkan penelitian ini mengambil wilayah Bandar Lampung sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf pada PWM Lampung dilakukan dengan konsep mengupayakan optimalisasi aset wakaf, yaitu dengan adanya proses penghimpunan, pemeliharaan, dan pendayagunaan aset wakaf, sehingga memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan tersebut belum dapat memberikan dampak yang signifikan disebabkan peningkatan pendapatan tersebut belum memenuhi standar kesejahteraan.

**Kata Kunci :** Manajemen, Wakaf, Kesejahteraan

## **PENDAHULUAN**

Peran wakaf dapat dikatakan sangat strategis dalam kehidupan umat Islam. Di samping sebagai ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan sebuah konsep dalam ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi masyarakat (Atthoillah, 2014). Wakaf dalam kaitanya dengan masalah sosial ekonomi harus dikelola secara produktif sehingga berujung pada kontribusi solutif terhadap perekonomian masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009).

Sejarah membuktikan bahwa wakaf telah berperan memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pembangunan sekolah, pembuatan karya tulis, pengadaan air bersih, dan pemenuhan kebutuhan fakir miskin. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah peranan wakaf tidak hanya terbatas pada pembangunan tempat-tempat ibadah dan pendidikan, tetapi menjangkau pada penyediaan biaya oprasional majelis ilmu, pendidikan, beasiswa, kesejahteraan guru, serta tenaga kependidikan lainnya (Abdul Ghofur Anshori, 2013).

Bahkan di era modern saat ini wakaf sudah diterapkan di berbagai negara, seperti di Mesir, Arab Saudi, Turki, Bangladesh, dan Malaysia, dengan pengelolaan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Bangladesh misalnya, wakaf uang dan juga wakaf tanah menjadi sarana pendukung kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan harta wakaf dikelola oleh kantor Administrasi Wakaf dan yayasan/komite wakaf yang tidak terdaftar pada kantor administrasi juga bekerja sama dengan *Sosial Invesment Bank Ltd* (SIBL), untuk mengembangkan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, dan lain-lain (Rozalinda 2015). Di negara ini terdapat 8.317 lembaga pendidikan Islam, 123.000 masjid, 55.584 lapangan untuk sholat idul fitri, 21.163 lahan pemakaman, dan 3.859 lembaga sosial lainnya yang statusnya adalah harta wakaf (Athoillah, 2014), sehingga wakaf di Bangladesh memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan betapa besar peran wakaf yang dapat disumbangkan untuk kepentingan masyarakat baik dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan, ekonomi maupun kegiatan-kegiatan akademik. Akan tetapi di Indonesia

faktanya lain, dimana perwakafan saat ini menghadapi masalah yang cukup kompleks, karena umumnya merupakan wakaf non produktif (Athoillah, 2014). Dimana biaya oprasionalnya terkesan membebani masyarakat. Problem lain yang tidak kalah penting adalah banyak lahan-lahan pertanian yang subur berubah menjadi lahan yang kering yang tidak produktif karena tidak bisa dimanfaatkan oleh nazhir. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas tanah wakaf untuk sarana ibadah dalam bentuk masjid dan musholla sebesar 79%, untuk lembaga pendidikan 55%, dan tanah perkuburan 9%. Jika dilihat dari luas lahan yang digunakan untuk bangunan masjid ternyata pemanfaatannya tidak menghabiskan seluruh lahan. Sebenarnya tanah kosong yang ada dipekarangan masjid masih bisa dimanfaatkan untuk model wakaf produktif berbasis masjid (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf pada tahun 2012 mencapai angka 3.492.045.373,754 m<sup>2</sup> yang tersebar di 420.003 lokasi di wilayah Indonesia (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). Seharusnya lahan yang begitu luas tersebut dapat membawa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika dikelola dengan produktif. Namun kenyataannya tanah wakaf tersebut belum digarap secara optimal, bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif, berdasarkan penelitian yang dilakukan *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) tentang harta wakaf yang dimanfaatkan secara produktif, di Indonesia terdapat 23% dengan rincian 19% berbentuk lahan sawah/kebun, sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk pertokoan hanya 3%, dan 1% berbentuk peternakan ikan (Najib dan Al-Makasarry, 2006). Padahal jika dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan secara produktif, maka hasilnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan (Mukhlisin, 2010).

Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah memberikan perhatian yang serius dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Hal ini dilakukan karena selama ini tradisi masyarakat Indonesia khususnya di pedesaan dalam

pengelolaan wakaf masih mengacu pada praktik wakaf konsumtif. Sebagai bukti dapat dikemukakan bahwa aset wakaf di masyarakat hingga saat ini umumnya berupa tanah dan bangunan yang secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat (konsumtif), bukan berupa komoditas yang dapat dikembangkan dan dikelola secara produktif sehingga berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Persoalanya sekarang adalah bagaimana mengarahkan wakaf agar tidak hanya dipahami sebagai sebuah pemberian yang dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan, temporal, dan berupa tindakan yang bersifat kuratif, melainkan dapat didorong ke arah yang lebih luas dan lebih produktif serta dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga memberikan kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini meninjau implementasi wakaf pada salah satu lembaga sosial keagamaan yang dieksplorasi dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkembang dan dapat membiayai proyek-proyek keagamaan serta menjadi salah satu instrumen kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu majelis wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung. Mengingat besarnya minat masyarakat untuk berwakaf di PWM Lampung hingga hari ini maka penting dilakukan pengelolaan wakaf secara profesional. Hal ini disebabkan karena maju mundurnya pengelolaan harta wakaf sangat tergantung pada bagaimana pengelolaannya. Oleh karena itu, demi tertib organisasi yang berkarakter efektif dan profesional, PWM Lampung telah menyusun sebuah program kerja untuk lebih mengefesiensikan pengelolaan harta benda wakaf. Adapun program kerja majlis wakaf dan kehartabendaan pada PWM Lampung dimulai dari penerbitan asset wakaf, penyelesaian asset tanah yang bermasalah dan juga pengembangan asset. Di samping tiga program utama tersebut, PWM Lampung juga memiliki beberapa program pemberdayaan asset wakaf yang dirasakan cukup modern yaitu berupa pengembangan dan pengamanan harta wakaf serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf.

Adapun Jumlah Aset Tanah Wakaf yang masuk pada pelaporan Majlis Wakaf dan Kehartabendaan adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Aset Tanah Wakaf Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung**

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas Tanah Wakaf (m<sup>2</sup>)</b>
1	Bandar Lampung	77.965.13
2	Metro	153.327
3	Lampung Selatan	157.852
4	Lampung Tengah	390.932
5	Lampung Utara	38.867
6	Lampung Timur	72.232
7	Lampung Barat	5.001
8	Pringsewu	*
9	Tanggamus	220.616.07
10	Pesawaran	*
11	Way Kanan	121.925
12	Mesuji	*
13	Tulang Bawang	112.663
14	Tulang Bawang Barat	*
<b>TOTAL</b>		<b>2.053.070.2</b>

*Sumber:* Laporan Data PWM Bandar Lampung

Dari keseluruhan tanah wakaf yang ada hampir keseluruhannya memberikan kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti tanah wakaf yang terdapat di Tanggamus. Aset wakaf berupa persawahan yang dikelola oleh masyarakat, hasilnya dibagi dua dengan lembaga majlis wakaf PWM dengan sistem bagi hasil. Pengelolaan sawah tersebut bermanfaat memberikan penghasilan tambahan, sehingga dengan kata lain aset wakaf tanah persawahan tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terdapat juga tanah wakaf yang dibangun menjadi universitas pendidikan, sehingga dengan demikian akan memudahkan akses masyarakat untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Majelis Wakaf pada PWM Lampung berusaha menghimpun wakaf yang berasal dari masyarakat dan kemudian hasil wakaf tersebut diorientasikan pada hal-hal produktif yang dapat berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenyataan adanya upaya pengelolaan wakaf pada lembaga sosial keagamaan tersebut menunjukkan bahwa peran wakaf menjadi semakin penting karena wakaf dikelola dan diberdayakan sehingga mampu membiayai proyek-proyek keagamaan dan ekonomi yang berkelanjutan.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **Konsep Manajemen Wakaf**

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat. Prinsip manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu, yang mana prinsip ini digali dari Al Quran dan Hadits. Teori manajemen Islam tentu memberi injeksi moral dalam konsep manajemen itu sendiri, yakni dengan mengatur bagaimana seharusnya seorang individu berperilaku, baik dalam suatu organisasi maupun dalam sebuah sosial kemasyarakatan. Dalam dimensi perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur sebuah kegiatan yang dilakukan dalam perwakafan, menghimpun wakaf, dan menjaga hubungan baik antar nazhir, wakif dan masyarakat.

Istilah manajemen berasal dari kata *manage* berarti *control*, yang dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani atau mengelola. Dalam literatur manajemen, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *Planning, Organizing, Leading, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama manajemen (Qahaf, 2007).

Pada dasarnya konsep manajemen jika dikaitkan pada konsep wakaf maka pengelolaan wakaf haruslah dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dengan menggerakkan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dalam wakaf diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga dengan demikian manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha dari nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu, setiap manager wakaf atau nazhir harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis (Rozalinda, 2015).

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta, yaitu *Catera* yang berarti payung, artinya orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan,

kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin. Sedangkan kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu: pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.

Sedangkan jika kesejahteraan dilihat dalam konsep ekonomi Islam, maka terdapat satu titik awal yang perlu diperhatikan dan bermuara pada *Aqidah Islamiah*. Secara umum, kesejahteraan dalam masyarakat dapat terjadi bila semua lapisan dalam masyarakat tersebut sudah bisa menikmati kehidupan yang layak. Tidak ada lagi kesenjangan besar di antara golongan-golongan tertentu. Dalam artian golongan kaya menyisihkan hartanya untuk golongan yang miskin. Anjuran ini mengisyaratkan bahwa dengan adanya perguliran harta dari yang kaya kepada yang miskin akan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dia haruslah mengembangkan kepribadianya dalam masyarakat, dan jika dihubungkan dengan kesejahteraan, maka kesejahteraan dalam islam tidaklah hanya dinilai dari ukuran material saja, akan tetapi juga diukur dari nilai non materi seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Sehingga kesejahteraan akan tercipta dengan seimbang, tidak mementingkan kebutuhan yang bersifat material saja akan tetapi juga ditekankan kebutuhan spiritual, yang meliputi kebutuhan keagamaan yang akan mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat (Mukhlisin, 2010).

## **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian ini adalah implementasi manajemen wakaf pada lembaga sosial keagamaan dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Ini

bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dimana pada PWM Lampung saat ini terdapat 14 wilayah yang dikelola sedangkan peneliti mengambil wilayah Bandar Lampung sebagai objek penelitian, disebabkan: pertama, wilayah Bandar Lampung merupakan wilayah yang paling lama dalam mengelola majlis wakaf dan kehartabendaan di PWM Lampung, *kedua* total asset wakaf di kota Bandar Lampung merupakan salah satu pengelola aset wakaf terbesar di PWM Lampung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Manajemen Wakaf Produktif**

Pengelolaan wakaf pada PWM Lampung dijalankan sejak berdirinya PWM itu sendiri dengan mengikuti petunjuk dan arahan dari Majelis wakaf dan kehartabendaan PP Muhammadiyah, baik proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengontrolan harta wakaf. Sebagai organisasi lembaga sosial keagamaan, Muhammadiyah telah menjalankan fungsinya sebagai Nadzir, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa diberikan kemungkinan suatu organisasi sosial keagamaan bertindak sebagai Nadzir harta benda wakaf. Artinya hal tersebut sangatlah sejalan dengan konsep Muhammadiyah itu sendiri, yang didalamnya tidaklah terpisahkan dari unsur perwakafan. Oleh karena itu, agar lebih efektif dalam melakukan pengelolaan wakaf, maka dibentuklah majlis yang khusus menangani hal tersebut, yaitu Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Dengan demikian segala hal yang berkaitan dengan harta benda dan perwakafan dapat langsung diintegrasikan dan dikelola langsung oleh Majelis tersebut.

Tugas pokok Majelis Wakaf dan Kehartabendaan tersebut adalah: Pertama, *Mengembangkan* harta benda wakaf, artinya adalah majelis wakaf dan kehartabendaan akan melakukan suatu usaha untuk memajukan, memanfaatkan, memproduksi asset-asset wakaf yang masih kosong atau terlantar untuk dikelola bersama dengan warga perserikatan muhammadiyah, sehingga dengan demikian diharapkan asset wakaf dapat lebih produktif dan terpelihara. Kedua: *Mengamankan* asset wakaf yang ada dengan cara menjaga, memelihara dan menyelesaikan masalah baik berupa persengketaan maupun hal-hal lainnya yang timbul terkait asset wakaf yang ada pada perserikatan Muhammadiyah. Ketiga:

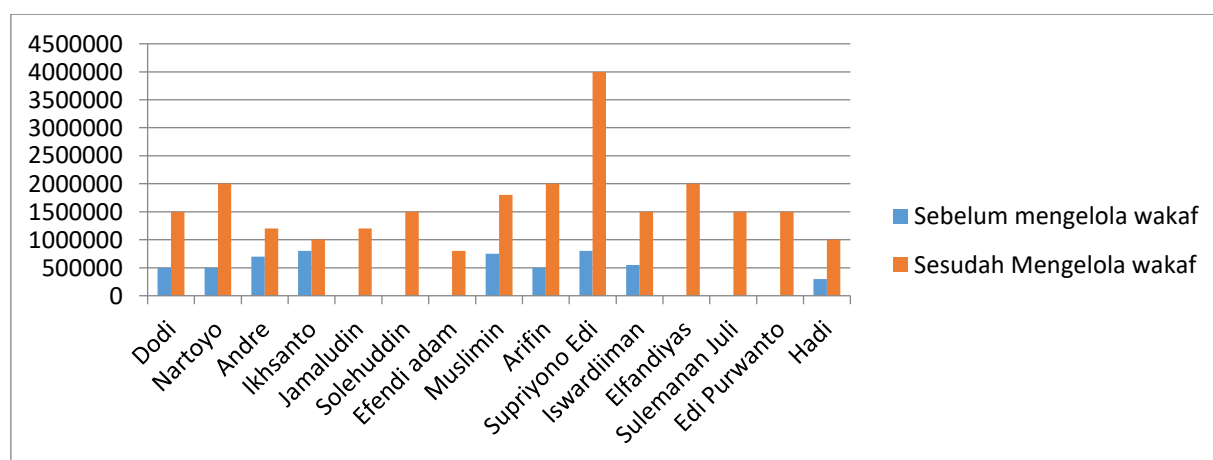


*Membimbing*, kaitan dalam hal ini Perserikatan Muhammadiyah harus memberikan pengarahan, pelatihan, dan tuntunan tentang prosedur penerimaan, pelaksanaan, pemeliharaan seluruh asset wakaf, sehingga masyarakat pdapat lebih termotivasi untuk melakukan ibadah wakaf.

Untuk memperkuat tingkat kelembagaan Muhammadiyah juga membentuk Jajaran organisasi berupa Majelis wakaf, zakat, infaq dan sadakah pada setiap pimpinan Wilayah, Cabang, dan Ranting yang masing-masing saling berkoordinasi dengan tingkat Wilayah, hal ini dilakukan untuk mempermudah akses pada setiap Cabang dan ranting yang berada di tingkat kabupaten dan kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan perwakafan khususnya untuk perserikatan Muhammadiyah dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Dengan berusaha memanfaatkan tanah- tanah wakaf selain untuk sarana ibadah, seperti masjid, musholla, majlis taklim, makam, juga memanfaatkan tanah-tanah wakaf tersebut untuk sarana sosial berupa sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan amal usaha yang lainnya.

### **Dampak Implementasi Manajemen Wakaf Produktif**

Salah satu dampak implementasi manajemen wakaf produktif, dapat tingkat pada pendapatan masyarakat pasca mengelola wakaf. Peneliti mengumpulkan beberapa data pengelola wakaf di PWM Lampung sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Berikut beberapa pengelola aset wakaf pada PWM Lampung:



**Gambar 1. Grafik Aset Wakaf pada PWM Lampung**

Berdasarkan data pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa keseluruhan kondisi ekonomi masyarakat perserikatan Muhammadiyah yang mengelola wakaf terlihat membaik setelah mendapatkan hasil pengelolaan atas aset wakaf yang ada di PWM Lampung. Bahkan terdapat 1 orang bernama Supriono Edi yang mengalami kemajuan pesat dibandingkan pendapatan sebelumnya. Dengan adanya aset wakaf yang dikelola oleh PWM Lampung, baik berupa aset yang telah dibangun lembaga pendidikan, masjid, lembaga keuangan (BMT), ataupun aset lahan yang dikelola oleh masyarakat perserikatan Muhammadiyah, telah berdampak terhadap tingkat penghasilan masyarakat.

Namun jika dilihat secara lebih mendalam hal tersebut belum begitu memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini penulis lihat dengan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator kesejahteraan rakyat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan Rumah tangga disesuaikan oleh informasi tentang pendapatan, pengeluaran, tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan, kemudahan mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan dan transport. Klasifikasi kesejahteraan yang digunakan terdiri dari dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dalam kategori sejahtera dan belum sejahtera. Untuk mengukur masing-masing klasifikasi kesejahteraan, ditentukan dengan cara mengurangkan jumlah skor tertinggi dengan jumlah skor terendah. Hasil pengurangan dibagi dengan jumlah klasifikasi atau indikator yang digunakan. Rumus penentuan *range skor* adalah:

$$RS = \frac{SkT - SkR}{JKI} \dots\dots\dots(1)$$

**Keterangan :**

RS = Range skor

SkT = Skor tertinggi ( 8 x 3 = 24 )

SkR = Skor terendah ( 8x 1 = 8)

8 = Jumlah indikator kesejahteraan BPS (kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga, perumahan dan lingkungan, dan sosial lainnya)

3 = Skor tertinggi dalam indikator BPS (baik)

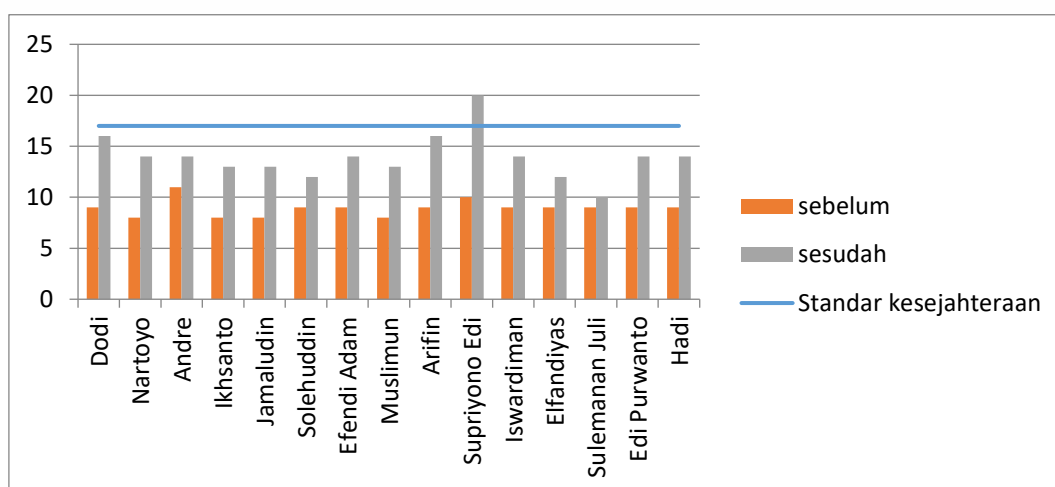
1 = Skor terendah dalam indikator BPS (kurang)

JKI = Jumlah klasifikasi yang digunakan (2)

Hasil perhitungan berdasarkan rumus tersebut diperoleh *range skor* (RS) sama dengan delapan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) Jika skor antara 8–16 berarti rumah tangga belum sejahtera.
- (2) Jika skor antara 17–24 berarti rumah tangga sudah sejahtera.

Penilaian indikator kesejahteraan atas 15 pengelola aset wakaf PWM Lampung sebagai sampel penelitian dapat dilihat dalam Gambar 2 sebagai berikut:



**Gambar 2**  
**Indikator Kesejahteraan Masyarakat**

Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa dengan adanya pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh PWM Lampung, baik berupa aset wakaf produktif maupun non produktif menunjukkan adanya dampak terhadap peningkatan pendapatan warga perserikatan Muhammadiyah yang terlibat mengelola wakaf. Sedangkan untuk masyarakat umum di sekitar Bandar Lampung juga menerima manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Wakaf di PWM Lampung dinilai mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, meskipun belum optimal berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan wakaf memang sangat diperlukan peran dari semua pihak, hal ini disebabkan karena maju mundurnya pengelolaan harta wakaf sangat tergantung pada bagaimana pengelolaannya. Oleh karena itu, demi tertib organisasi yang berkarakter efektif dan professional, maka PWM Lampung harus menyusun sebuah program kerja untuk lebih

mengefesiensikan pengelolaan harta benda wakaf tersebut. Dimulai dari penerbitan asset wakaf, penyelesaian asset tanah yang bermasalah dan juga pengembangan assetnya. Selain itu, peranan pemerintah juga tidak kalah penting. Di samping sebagai regulator, pemerintah juga dirasa perlu memberikan sosialisasi-solialisasi secara lebih serius kepada para Nadzir agar Nadzir dapat mengetahui lebih dalam tentang pengelolaan wakaf sehingga wakaf dapat produktif dan berdaya guna lebih, sehingga berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen wakaf pada PWM Lampung dilakukan dengan cara penghimpunan, pemeliharaan, dan pendayagunaan terhadap aset wakaf yang ada, hal ini terlihat dari adanya proses pengembangan, pengamanan dan bimbingan yang dilakukan oleh PWM Lampung, sehingga dapat menjadikan harta benda wakaf lebih berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat perserikatan Muhammadiyah. Selain itu, wakaf yang dikelola oleh PWM Lampung mampu memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat perserikatan Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya. Warga dapat memperoleh hidup lebih baik secara ekonomis, dengan mengelola asset wakaf ataupun dengan menerima manfaat atas asset wakaf yang dikelola oleh PWM Lampung. Akan tetapi peningkatan pendapatan tersebut belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perserikatan Muhammadiyah, meskipun terdapat peningkatan pendapatan, namun peningkatan pendapatan tersebut belum memenuhi standar kesejahteraan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1-28.
- Anshori, AG, & Ruslan Noor. (2013). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Athoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak*. Bandung: Yrama Widya.
- Dennis, D., Qoyum, A., & Sakti, M. P. (2018). Determinant of Cash Waqf Nahdatul Ulama (Case of Muslim Students in Indonesia). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 22(1).
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2007). *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.

- Furqon, A. (2016). Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan. *Al-Ahkam*, 26(1).
- Haron, M., Kamarudin, M. K., Fauzi, N. A., Ariff, M. M., & Zainuddin, M. Z. (2016). Cash waqf collection: Any potential factors to influence it. *International Journal of Business, Economics and Law*, 9(2).
- Huda, N et.al. (2018). Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20(1).
- Kachkar, O. A. (2017). Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Mochtar, MZ. (2016). Perceptions of University Sains of Malaysia Muslim Staff on Factor Influencing Their Intention to Permor Cash Waqf, *Journal of Islamic Studies and Culture*, 4(2).
- Muflichah, S. Implementation and Protection of Legal Law on Cash Waqf toward Tabung Waqf Indonesia of Dompot Duafa Jakarta, *Jurnal Economic dan Hukum Islam*, 17 (2).
- Mukhlisin, M. (2010). *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Najib, T. A., & Al-Makassary, R. (2006). *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Pratama, A. F. B. R. (2019). Analisis Konsep Highest and Best Use Untuk Tanah Wakaf Menurut Perspektif Islam. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2).
- Qahaf, M. (2007). *Manajemen Wakaf Produktif*, Cetakan Ketiga. Jakarta: KHALIFA.
- Rasyid, KA et.al. (2019). Empowering Waqf and Zakat in The Provision of Affordable Housing Through Collaborative Procurement. *Journal of Islamic Economic*, 2(4).
- Rizal, H., & Amin, H. (2017). Perceived ihsan, Islamic egalitarianism and Islamic religiosity towards charitable giving of cash waqf. *Journal of Islamic Marketing*, 8(4).
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim, Z. (2010). *Panduan Wakaf*. diterbitkan Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Syakur, Abd et.al. (2018). Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 13(1).